

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Mengingat sumber daya manusia merupakan salah satu aset nasional yang mendasar dan faktor penentu utama bagi keberhasilan pembangunan, maka dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki landasan yang berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945.

Juknis BOS 2016 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan

oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11% (sembilan puluh delapan koma sebelas persen), sehingga program wajib belajar 9 (sembilan) tahun telah tuntas 7 (tujuh) tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All (EFA)* di Dakar.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Pemerintah merupakan komponen terbesar dalam pembagian organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.

Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan untuk organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perusahaan atau sektor privat. Akuntansi sektor publik terdiri atas akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan, dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata, tetapi sektor publik atau pemerintah dibentuk dengan tujuan umum memberikan pelayanan publik atau mensejahterakan rakyat.

Bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah dan banyak sekali ditemukannya berbagai masalah atau kendala pendanaan yang muncul. Selain itu, tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada saat ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing agar mampu berkompetisi pada tingkat global.

Salah satu bentuk bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi masyarakat ialah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS ini ditujukan pada semua lembaga pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dana BOS yang diberikan pemerintah digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan

pendidikan dasar. Pemerintah berharap dengan adanya dana BOS ini semua lapisan masyarakat dapat mengikuti pendidikan tanpa perlu memikirkan biaya pendidikan. Pemerintah ingin Dana BOS yang telah diberikan dapat memenuhi kebutuhan para siswa dan tidak ada lagi pungutan untuk orang tua.

Sekolah sebagai suatu entitas sekolah harus mampu mengelola dana BOS secara profesional dan akuntabel untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dari sisi manajemen keuangan, MBS menurut pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan buku yang berisi petunjuk teknis tentang penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah tiap tahunnya. Tujuan pemerintah menerbitkan buku petunjuk teknis setiap tahunnya agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisiensi dan efektifitas, tepat waktu, dan terhindar dari segala

penyimpangan. Dengan adanya buku ini sekolah dapat mengerti cara menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut kepada kepala dinas dan wali murid. Buku petunjuk teknis ini diterbitkan setiap tahun anggaran.

Buku petunjuk teknis ini memuat penjelasan - penjelasan mengenai penggunaan dana BOS yang meliputi organisasi pelaksana, prosedur pelaksanaan BOS, penggunaan dana BOS, monitoring dan supervisi, pengawasan, pemeriksaan dan sanksi, pengaduan masyarakat dan formulir isian. Selain penggunaan dana BOS juga ada tentang petunjuk laporan keuangan BOS yang meliputi perpajakan, pertanggungjawaban keuangan dan formulir isian. Tercantumnya semua peraturan dan petunjuk yang diberikan pemerintah diharapkan sekolah mampu mengelola dan menggunakan dana tersebut secara akuntabel.

Masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Mulai dari pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran. Pada tingkat penyelenggara (Sekolah), tidak ada aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran. Penyebab lain juga terjadi pada partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Jelas terlihat bahwa di dalam implementasinya, fungsi pengawasan sangat kurang. Tidak ada

partisipasi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana BOS di sekolah. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator kunci dalam implementasinya terkait dengan Dana BOS.

Realisasi Anggaran merupakan suatu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat yang dalam hal ini komite sekolah dan wali murid. Realisasi Anggaran merupakan landasan bagi proses pengelolaan dana BOS yang harus mempertanggung jawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada masyarakat (komite sekolah dan wali murid). Realisasi Anggaran dalam pengelolaan dana BOS menyangkut hak masyarakat (wali murid) untuk memperoleh pertanggung jawaban penyelenggaraan program dana BOS.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini berusaha untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Agar pengelolaan bantuan operasional sekolah tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran dana BOS antara lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya oleh karena itu, realisasi anggaran sangat penting dilakukan terkait pengelolaan anggaran dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Balongsari 1 Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dalam menciptakan kebaikan bagi peserta didik Sehingga peneliti mengambil judul **“Analisis Realisasi Anggaran Pengelolaan Bantuan Operasional**

Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri Balongsari I Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang”.

Alasan pemilihan judul tersebut di atas adalah agar realisasi anggaran dapat disalurkan pada program - program kegiatan sekolah yang sesuai dengan petunjuk teknis BOS, agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan siswa dan siswi di Sekolah Dasar Negeri Balongsari I Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah realisasi anggaran pengelolaan BOS telah sesuai dengan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan?
2. Apakah pihak sekolah sudah mampu dalam mengelola administrasi keuangan sekolah sesuai realisasi anggaran?

1.3. Batasan Masalah

Semua masalah sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya perlu diungkap dalam upaya membantu sekolah menentukan langkah dan mekanisme yang tepat dalam pengelolaan penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS), agar sekolah mampu meningkatkan partisipasi pendidikan sehingga tujuan dan sasaran program tercapai sesuai target yang telah ditentukan, maka batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan informasi akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan Sekolah Dasar Negeri Balongsari I Tahun 2016.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah realisasi anggaran pengelolaan BOS telah sesuai dengan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan?
2. Untuk mengetahui apakah pihak sekolah sudah mampu dalam mengelola administrasi keuangan sekolah sesuai realisasi anggaran?

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai analisis realisasi anggaran, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dapat digunakan sebagai pembandingan untuk peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi wali murid dan yang berkepentingan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam laporan realisasi anggaran keuangan sekolah.
- b. Bagi Sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan yang ada di sekolah agar bisa berjalan sesuai dengan realisasi anggaran BOS.